

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN): KAWASAN PESISIR RUPAT UTARA

Khairul Amri, Tutut Ismi Wahidar, Ahmad Fuadi

Study Program Public Administration FISIP Universitas Riau, Pekanbaru

Email: khairul.amri@lecturer.unri.ac.id, tutut.ismi.wahidar@lecturer.unri.ac.id,
ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang mencakup Koordinator, Fasilitator, Regulator.

Kata kunci: Peran pemerintah, pengembangan KSPN, Rupert Utara

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlakukan untuk menunjang industri wisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak di berbagai segi antara lain dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak lingkungan, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsungnya salah satunya bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum publik. Dan dampak berkelanjutan tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja dalam bidang pariwisata ataupun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya.

Menurut Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009). Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal bangsa, kebudayaan, adat-istiadat dan sekaligus dapat menikmati keindahan alam di negara lain. Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa.

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antar bangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata di Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dinilai masih tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pariwisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di atas maka salah satu tugas penting pemerintah kabupaten Bengkalis adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Pemerintah kabupaten Bengkalis mempunyai hambatan terbesar terutama letaknya belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung, pengelolaan nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik. Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004).

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Menurut (Terry, 2009) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Murphy dalam Sedarmayanti (2014) pariwisata adalah Keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lainlain) yang merupakan akibat dari perjalanan ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari situasi dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan di Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Adapun dasar dalam pengambilan penelitian ini adalah pertimbangan objek dan subjek penelitian yang memungkinkan peneliti untuk lebih banyak menggali informasi di lokasi penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Kawasan Pesisir Rupat Utara**

Kabupaten Bengkalis memiliki keragaman potensi daya tarik wisata, baik potensi kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakatnya. Dari sekian banyaknya aktifitas wisata yang di jumpai di kabupaten Bengkalis, yang menarik perhatian adalah wisata alam yang terletak di Rupat Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Gambar 1. Peta Kabupaten Bengkalis

Objek Wisata alam yang berada di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis perlu dikembangkan sebagai salah satu destinasi tempat wisata favorit masyarakat Bengkalis pada khususnya. Oleh karena itu dalam pengembangannya, ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita ini merupakan alasan filosofis keberadaan suatu organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dimana alasan filosofis tersebut berkaitan dengan gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan.

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial. Sebenarnya pembangunan pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Tabel 1. Potensi Wisata Pulau Rupat

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek
1	Pantai Pesona	Wisata Alam
2	Pantai Tanjung Lapin	Wisata Alam
3	Pantai Pasir Putih	Wisata Alam
4.	Pulau Beting Aceh	Wisata Alam
5	Pantai Makeruh	Wisata Alam
6	Pantai Ketapang	Wisata Alam
7	Hutan Mangrove	Wisata Alam
8	Tarian KAT Suku Akit	Wisata Budaya
9	Makam Putri Sembilan	Wisata Budaya
10	Mandi Safar	Wisata Buatan
11	Festival Pantai Rupat	Wisata Buatan

Sumber: Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Pulau Rupat Utara, 2022

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingannya lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Sebagai Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah atau dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi dibidang pariwisata baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industry pariwisata.

Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal.

Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yaitu seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan namun masih belum terlaksana dengan baik, seperti masih sulitnya akses menuju ke lokasi objek wisata yang disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai.

Pariwisata bisa didefinisikan sebagai suatu ketertarikan terhadap sesuatu hasil kebudayaan dan tata cara hidup suatu masyarakat, kekhasan suatu daerah atau panorama alam yang jarang dijumpai di daerah (Negara) lain. Dengan demikian maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya motivasi orang tertentu untuk datang berkunjung. Adanya pengunjung ini akan menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertukaran barang atau informasi yang memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan pariwisata di kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur seperti menyediakan sarana prasarana.

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Posisi sektor pariwisata kabupaten Bengkalis sangat penting sebagai salah satu bisnis inti kabupaten Bengkalis oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala pelaksanaan kegiatan. Untuk memasuki objek wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara pengunjung dilarang membawa senjata tajam, karena benda tersebut bias saja membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, begitu pula dengan obat terlarang pengunjung dilarang membawa obat-obat terlarang ketika memasuki objek wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupert Utara karena seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan obat terlarang akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Kawasan Pesisir Rupert Utara Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang mencakup: Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator belum terlaksana dengan baik, karena dalam hal ini masih sulitnya akses menuju ke lokasi objek wisata yang disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai. Regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lailiyah, I. S., Kusbandrijo, B., & Murti, I. Evaluasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Riska, R., Muhammadiyah, M., & Sudarmi, S. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Kebun Raya Massenrempulu Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 963-977.

- Arfan, A., Umar, R., & Fauzi, K. (2017). Peranan Pemerintah, Masyarakat dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Sainsmat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 6(2), 107-115.
- Abdillah, M. D., Almagribi, M. A., Lamnyunyai, A. F., & Zaidi, A. R. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Daerah Pariwisata Yang Maju.
- Rahman T, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Surya, I. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pallette di Kabupaten Bone.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun & Mengembangksn Kebudayaan & Industry Pariwisata*(Bunga Rampai Tulisan Pariwisata) Bandung: Refika Aditama.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Medpress Bandung : PT. Refika Aditama
- Suwantoro, 2007, *Pariwisata*, Edisi Pertama Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Warpani P, 2007, *pariwisata dalam tata ruang wilayah*, ITB Bandung
- Allo, M. D., Kabanga, T., Situru, R. S., & Dewi, R. (2018). *Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di kabupaten Tana Toraja*.
- Astuti, M. T., & Noor, A. A. 2016. *Daya Tarik Morotai Sebagai Destinasi Wisata Sejarah dan Bahari*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 25-46